

PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERDESAAN: PENGEMBANGAN SDM, Penguatan Usaha, dan Inovasi Pertanian

Poverty Reduction in Rural Areas: Human Resource Development, Business Strengthening and Agricultural Innovation

Hermanto

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111
Korespondensi penulis. E-mail: hermanto809@yahoo.com

Naskah diterima: 21 November 2017

Direvisi: 14 Desember 2017

Disetujui terbit: 20 Februari 2018

ABSTRACT

Poverty is an all-time problem. The process of inheritance of poverty from generation to generation will continue if there is no breakthrough to alleviate poverty. This literature study aims to determine the role of human resource development, strengthening of farmers' business and agricultural innovation in poverty alleviation. Although poverty in Indonesia has decreased significantly, the data showed that the number of poor people is still concentrated in rural areas. The development of human resources and the strengthening of farmers' business institutions, therefore, become medium-term and long-term strategic efforts for poverty alleviation in rural areas. Challenges to sustainable agricultural production in the future will require combined efforts of technological and innovation development, improvement of agricultural policies, and strengthening of agricultural institutions. Agricultural research and development should be focused on enhancing sustainable production.

Keywords: *poverty alleviation, human resource development, business strengthening, agricultural innovation*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sepanjang masa, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui peran pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan usaha petani dan inovasi pertanian dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Walaupun kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan, tetapi data menunjukkan bahwa penduduk miskin masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduk miskin di pedesaan berpendidikan rendah, dan menguasai lahan yang sempit, maka pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan usaha petani merupakan upaya strategis jangka menengah dan jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Karena tantangan terhadap pembangunan pertanian di masa depan akan lebih kompleks, maka perlu untuk mengupayakan perpaduan antara pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyempurnaan kebijakan pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di pedesaan. Penelitian dan pengembangan pertanian sebagai penghasil teknologi baru dan inovasi pertanian hendaknya terfokus pada peningkatan produksi secara berkelanjutan.

Kata kunci: *pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, penguatan usaha, inovasi pertanian*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah sepanjang masa bagi kehidupan manusia, karena kemiskinan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bagaikan sebuah roda yang tak pernah berhenti berputar. Anak yang berasal dari keluarga miskin tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak baginya untuk dapat meningkatkan

kapasitasnya agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih layak di masa dewasanya. Melalui proses pewarisan kemiskinan ini, anak keturunan dari keluarga miskin pada usia dewasanya akan tetap menjadi keluarga miskin. Dengan demikian proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan tersebut.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan atas pangan bergizi yang memadai ditambah dengan kebutuhan nonmakanan yang minimum (Wolff et al. 2015). Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak hanya menyangkut faktor ekonomi semata tetapi juga menyangkut faktor sosial, politik dan budaya. Meski demikian, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan sosial, politik dan budaya menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan anti kemiskinan (Ikhsan, 2010).

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan anti kemiskinan. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah pada saat ini di antaranya adalah: (1) Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita, atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD, dan/atau SMP, dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar; (2) Program Raskin (yang sekarang menjadi Rastra/Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah; dan (3) Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk dan telah dibina melalui Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial (Ernada dan Gaol, 2015).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan telah menunjukkan hasil yang nyata yaitu berupa penurunan persentase penduduk miskin dari sekitar 19,14% pada tahun 2000, turun menjadi sekitar 11,22% pada tahun 2015; atau dengan rata-rata laju penurunan persentase kemiskinan sebesar -4,33% per tahun. Walaupun demikian permasalahan yang timbul sebagai eksekusi dari pembangunan pada saat ini adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial. Rasio Gini pada tahun 2002 masih sekitar 0,341, kemudian naik menjadi 0,413 pada tahun 2013, dan sedikit menurun menjadi 0,397 pada tahun 2016.

Demikian halnya dengan kondisi kemiskinan yang masih relative tinggi di wilayah perdesaan yaitu sebesar 14,21% pada tahun 2015, lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 8,29% (BPS, 2017).

Ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomis. Menurut Iryanti (2014) ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antar kelompok ekonomi dapat berakibat pada: (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi, karena berkurangnya skala ekonomi pasar; (2) Berkurangnya kohesi sosial dan politik di kalangan masyarakat karena terjadinya persepsi publik tentang kesejahteraan yang belum adil dan merata; dan (3) Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan yang akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Prawoto (2009) menyatakan bahwa belum optimalnya hasil program-program penanggulangan kemiskinan karena belum banyak menyentuh aspek sosial, budaya, hukum dan politik, bahkan aspek agama. Oleh karena itu, disarankan agar penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, serta dalam pelaksanaannya agar melibatkan peran serta para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat, termasuk masyarakat miskin sebagai subyek pelaksana program.

Tulisan ini merupakan telaahan pustaka tentang strategi pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan yang merupakan strategi jangka menengah dan jangka panjang. Pada bagian kedua tulisan ini membahas bagaimana perkembangan terkini tentang kondisi kemiskinan secara nasional, yang dibedakan atas kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada bagian ketiga, tulisan ini membahas tentang perlunya pengembangan sumber daya manusia sebagai subyek dalam pengentasan kemiskinan pada diri, keluarga dan komunitasnya, serta tentang perlunya penguatan usaha dipertanian, utamanya usaha pertanian dalam arti luas sebagai sumber pendapatan yang dapat mengentaskan masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Pada bagian selanjutnya tulisan ini membahas tentang pentingnya inovasi pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru untuk peningkatan pendapatan usaha pertanian di perdesaan. Pada bab terakhir disampaikan kesimpulan dan implikasi kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan.

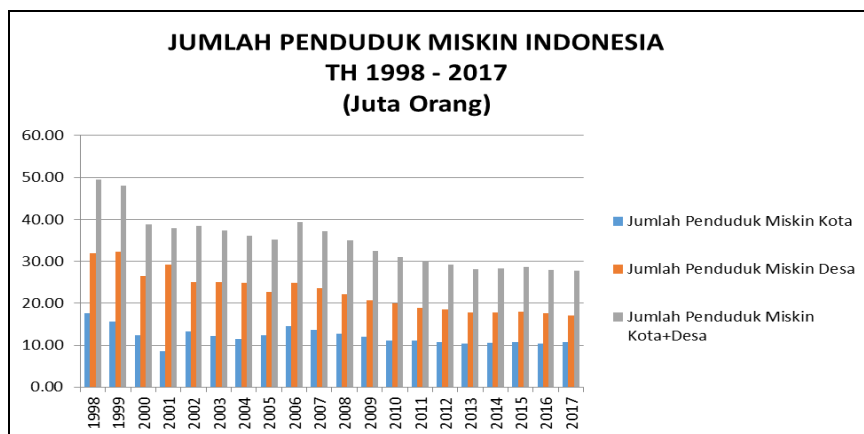
KONDISI KEMISKINAN DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Secara umum jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi dunia, telah mengalami penurunan yang cukup nyata, yaitu dari jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan perdesaan adalah 49,50 juta jiwa pada tahun 1998, menjadi sekitar 27,77 juta jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan selama periode tahun 1998–2017 tersebut turun dengan laju penurunan rata-rata -2,84% per tahun (Grafik 1).

Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan, yaitu dari 17,60 juta jiwa pada tahun 1998, menjadi 10,67 juta jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan selama periode

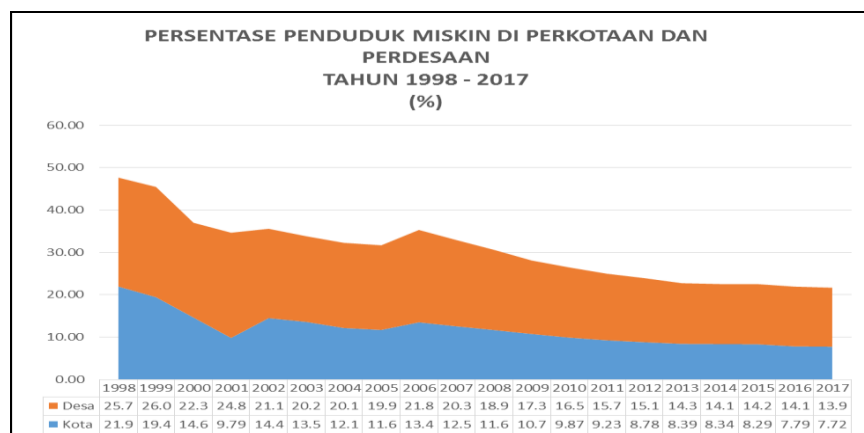
tahun 1998–2017 mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata -1,39% per tahun, walaupun sempat dua kali mengalami lonjakan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, yaitu antara tahun 2001 dengan 2002 sebesar 54,90% per tahun, dan antara tahun 2005 dengan 2006 sebesar 16,85% per tahun (Grafik 1).

Jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi selama periode tahun 1998–2017 jumlahnya tetap relatif lebih besar dari jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan. Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan adalah 31,90 juta jiwa, turun menjadi 17,10 juta jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan selama periode tahun 1998–2017 mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata -3,00% per tahun (Grafik 1).



Sumber: BPS (2017)

Grafik 1. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia, 1998-2017



Sumber: BPS (2017)

Grafik 2. Perkembangan persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan di Indonesia, 1998-2017

Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan secara gradual turun dari 21,92% pada tahun 1998, menjadi 7,72% pada tahun 2017. Laju penurunan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan selama periode tahun 1998–2107 rata-rata adalah -4.49% per tahun. Persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan juga mengalami penurunan dari 25,72% pada tahun 1998, menjadi 13,93% pada tahun 2017. Laju penurunan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan selama periode tahun 1998–2107 rata-rata adalah -3,26% per tahun (Grafik 2).

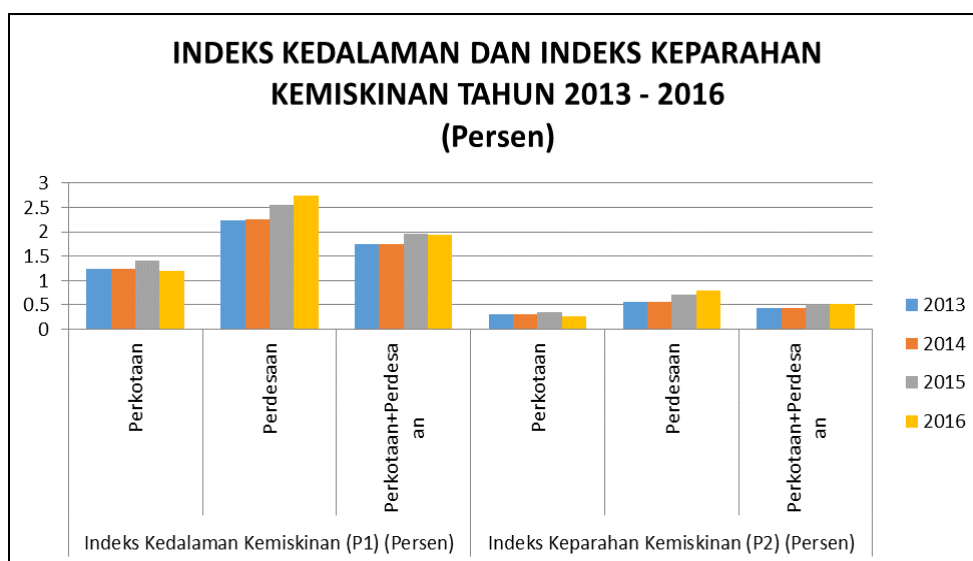
Tingkat kesenjangan kemiskinan dalam suatu kelompok masyarakat dapat diukur dengan menggunakan konsep Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1). Menurut BPS (2017) Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data pada Grafik 3 menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung menurun dari 1,25 pada tahun 2013, menjadi 1,19 pada tahun 2016. Sementara itu data Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung meningkat dari 2,24 pada tahun 2013 menjadi 2,74 pada tahun 2016.

Kondisi keragaman pendapatan pada kelompok masyarakat miskin dapat diukur dengan menggunakan konsep Indeks

Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*). Menurut BPS (2017) Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi keragaman pengeluaran di antara penduduk miskin. Data pada Grafik 3 menunjukkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung menurun dari 0,31 pada tahun 2013 menjadi 0,27 pada tahun 2016. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan di wilayah perdesaan justru menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 0,56 pada tahun 2013 menjadi 0,79 pada tahun 2016.

Data tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sekitar 40,30% dari kepala rumah tangga miskin berpendidikan tidak tamat SD, dan sekitar 40,47% tamat SD. Pada tahun 2015, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan tidak tamat SD cenderung sedikit meningkat menjadi 40,81%, sedangkan yang tamat SD cenderung turun menjadi 38,78% (Grafik 4). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada akhir-akhir ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) rumah tangga miskin ditinjau dari segi pendidikan formalnya tidak mengalami perubahan yang nyata.

Dilihat dari sumber penghasilan rumah tangga miskin, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 sumber utama pendapatan rumah tangga miskin adalah sektor pertanian dalam arti luas, yaitu sekitar 52,18%. Walaupun ada kecenderungan sedikit menurun, peran sektor



Sumber: BPS (2017)

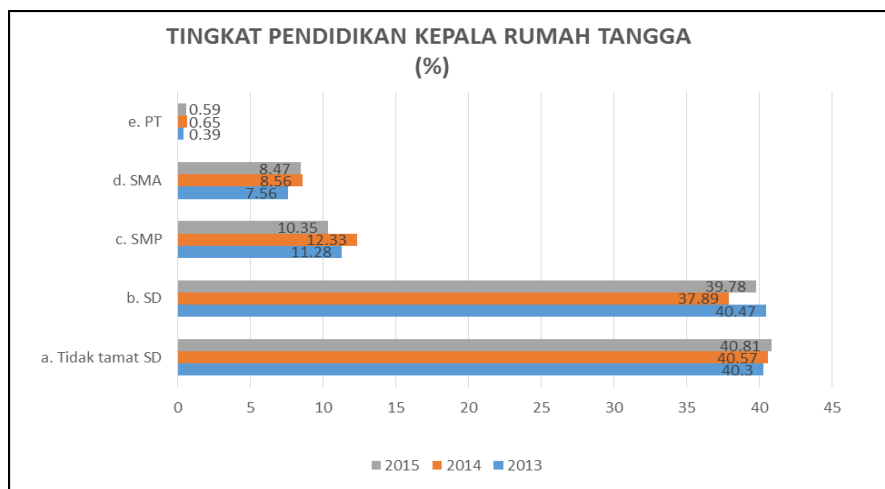
Grafik 3. Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia, 2013–2016

pertanian sebagai sumber utama bagi sebagian besar rumah tangga miskin pada tahun 2015 masih tetap dominan, yaitu sebesar 49,60%. Peran sektor industri sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga miskin masih relatif rendah, yaitu sekitar 6,21% pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 7,10% pada tahun 2015 (Grafik 5).

Salah satu indikator untuk mengetahui lebih jauh tentang kondisi usaha pertanian di Indonesia adalah data tentang penguasaan lahan pertanian oleh petani. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS, 2017) menunjukkan bahwa sekitar 55,95% petani menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, dan hanya sekitar 26,62% petani yang menguasai lahan pertanian lebih luas dari 1

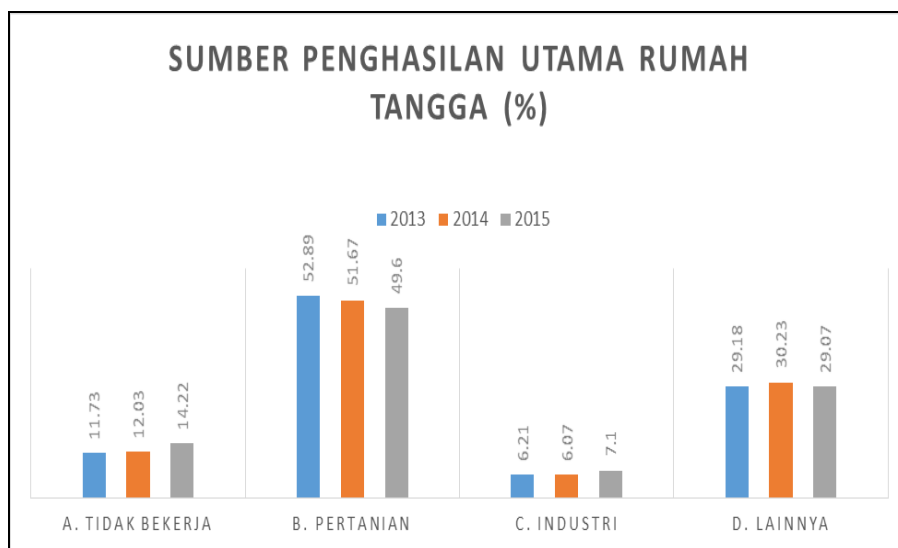
hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha pertanian di Indonesia merupakan usaha pertanian bersekala usaha kecil atau gurem (Grafik 6).

Besarnya rasio Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat, yang dalam hal ini pendapatan masyarakat diukur dengan tingkat pengeluarannya (BPS, 2017). Data perkembangan rasio Gini pada periode tahun 2002 – 2016 menunjukkan bahwa secara nasional rasio Gini di Indonesia mengalami kenaikan dari 0,34 pada tahun 2002, menjadi 0,40 pada tahun 2016, walaupun rasio Gini sejak tahun 2011 cenderung tetap pada kisaran 0,40 - 0,41. Secara umum dapat dikatakan bahwa rasio Gini di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi, yaitu pada kisaran 0,34 – 0,41



Sumber: BPS (2017)

Grafik 4. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin di Indonesia, 2013–2015



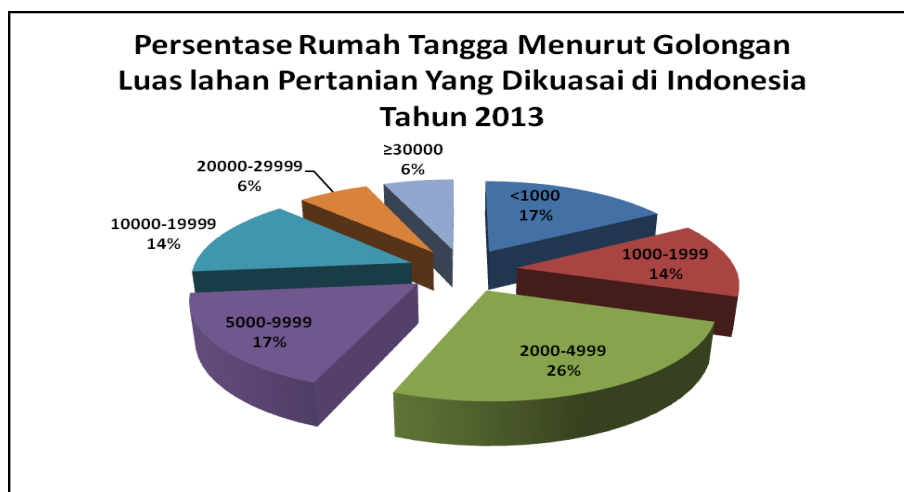
Sumber BPS (2017).

Grafik 5. Sumber penghasilan utama rumah tangga miskin di Indonesia, 2013–2015

di bandingkan dengan wilayah perdesaan pada kisaran 0,26 – 0,33 (Grafik 7). Keadaan ini mengindikasikan bahwa secara umum ketimpangan pendapatan bagi masyarakat di wilayah perkotaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di wilayah perdesaan.

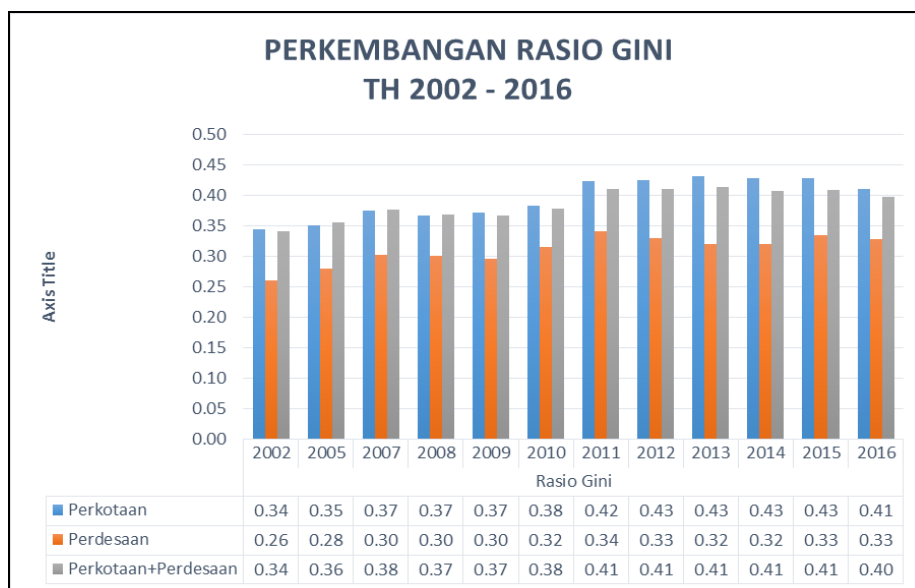
Dari pembahasan terdahulu diperoleh informasi bahwa kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah perdesaan lebih rendah dari ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan, tetapi Indeks Kedalaman dan Indeks

Keparahan Kemiskinan di perdesaan relative lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Di samping itu, mengingat bahwa pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi penduduk miskin, maka pembangunan pertanian di perdesaan perlu mendapatkan prioritas utama dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia pada umumnya, dan khususnya bagi penduduk miskin di perdesaan. Walaupun menurut IFAD (2016) disadari benar bahwa pembangunan perdesaan dan perkotaan pada kenyataannya saling terkait, karena pertumbuhan produktivitas pertanian memberikan pasokan pangan dan penyediaan tenaga kerja bagi pertumbuhan dan



Sumber: BPS (2017)

Grafik 6. Presentase rumah tangga menurut golongan luas lahan pertanian yang dikuasai di Indonesia, 2013



Sumber: BPS (2017).

Grafik 7. Perkembangan rasio gini masyarakat perkotaan dan perdesaan di Indonesia, 2002–2016

transformasi perkotaan. Sedangkan pembangunan di perdesaan memerlukan pasokan bahan baku dan aneka ragam barang konsumsi dari ekonomi perkotaan.

PENGEMBANGAN SDM DAN PENGUATAN USAHA DI PERDESAAN

Data tentang profil SDM penduduk miskin mengindikasikan bahwa kualitas SDM penduduk miskin, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan masih relative rendah. Di samping itu, data tentang luas penguasaan lahan pertanian, menunjukkan bahwa usaha pertanian di Indonesia didominasi oleh usaha pertanian kecil atau gurem. Kondisi demikian menjustifikasi bahwa pengembangan SDM dan penguatan usaha di perdesaan merupakan upaya strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Menurut Setiyanto (2015) peningkatan kualitas SDM merupakan kunci dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) satu satuan akan berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin 3,03 juta orang, dengan rincian 1,12 juta orang di wilayah perkotaan dan 1,91 juta orang di wilayah perdesaan. Menurut Aji (2015) pekerja terampil cenderung memperoleh penghasilan lebih banyak daripada mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Sebagai contoh, bagi mereka yang memiliki pendidikan menengah pertama menikmati pendapatan lebih tinggi 20%, mereka dengan tingkat pendidikan menengah atas memiliki pendapatan lebih tinggi 40%, dan mereka yang memiliki pendidikan tersier memperoleh dua kali lipat dari mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar.

Pengembangan SDM di perdesaan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pembahasan dalam kajian ini lebih difokuskan pada pengembangan kualitas SDM penduduk miskin di perdesaan dari aspek pendidikannya. Menurut Utama (2009) pendidikan merupakan investasi dan kesempatan bagi SDM untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik, dan menjangkau semua lapisan masyarakat (*education for all*), akan tercapai peningkatan kualitas SDM sebagaimana yang ditargetkan dalam MDGs. Dengan demikian, pendidikan dapat dijadikan instrumen yang paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan di Indonesia. Perdana

(2014) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan bagi penduduk miskin ini Pemerintah Indonesia tidak perlu mulai dari nol (*"reinvent the wheel"*). Pemerintah telah mengembangkan sejumlah instrumen yang dapat difungsikan sebagai landasan dari suatu sistem kesejahteraan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Pendidikan dapat dilaksanakan dengan pendekatan formal, nonformal, atau informal. Dengan demikian, program pendidikan bagi penduduk miskin di perdesaan dapat dilakukan melalui pendekatan: (1) Bantuan pendidikan formal melalui perluasan akses pendidikan formal bagi anak usia sekolah (6-18 tahun), (2) Bantuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan (3) Pendidikan informal yang merupakan jalur pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan secara mandiri (Sumarno, 2011).

Sekolah Lapangan Petani (SLP), merupakan salah satu pendekatan pendidikan informal dalam rangka mengimplentasikan program-program pembangunan pertanian bersama masyarakat. SLP memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk berinteraksi dengan peserta yang lain, saling bertukar pengalaman, menyampaikan pendapat, menganalisis setiap persoalan yang dihadapi, mengambil kesimpulan dan selanjutnya berani mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan persoalan bersama. SLP merupakan proses belajar yang tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah formal yang mana SLP juga memiliki kurikulum sebagai acuan belajar. Kurikulum SLP merupakan hasil rumusan bersama antara fasilitator dengan peserta yang tentu saja berdasarkan prioritas persoalan yang sedang dihadapi oleh peserta (Sutoyo, 2012).

Selain masalah kualitas SDM yang relative rendah, pembangunan ekonomi perdesaan pada umumnya, dan pengentasan kemiskinan di perdesaan pada khususnya menghadapi permasalahan yang terkait dengan skala usaha rumah tangga yang kecil. Menurut Saptana et al. (2014), beberapa kendala dalam pengembangan usaha mikro/kecil adalah: (1) Keterampilan pelaku usaha yang masih terbatas, ketersediaan bahan baku yang tidak kontinyu, sehingga jenis usaha berubah sesuai ketersediaan bahan baku yang bersifat musiman; (2) Keterbatasan modal, sehingga skala usaha masih relatif kecil, aksesibilitas ke sumber permodalan masih relatif terbatas; (3)

Usaha masih dilakukan secara individu, belum terbentuk kelompok usaha yang kuat, dan belum terbentuk jejaring kerja terkait dengan sumber permodalan maupun dalam pemasaran hasil; dan (4) Jasa keuangan yang melayani pembiayaan usaha mikro masih terbatas. Di samping itu, menurut Firdaus (2014) secara umum upaya pengentasan kemiskinan perdesaan melalui penguatan usaha juga menghadapi permasalahan kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha. Konsep kewirausahaan sosial penting dalam penciptaan nilai sosial untuk mencapai tujuan pengembangan usaha melalui berbagai aktivitas yang inovatif.

Mengingat masih lemahnya usaha ekonomi masyarakat miskin di perdesaan, Pemerintah perlu melaksanakan program aksi dalam rangka penguatan usaha dipedesaan. Dalam hal ini, Pemerintah dapat melakukan: (1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan komunitas di tingkat desa yang berbasis pada aspek: sosial, ekonomi produktif dan/atau sektoral; (2) Fasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada kelembagaan komunitas; (3) Fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbasis potensi sumber daya alam (SDA) dan kewilayahan; dan (4) Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga usaha dalam pengelolaan keorganisasiannya (Direktur Jenderal PPMD, 2015).

Penguatan kelembagaan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan terkait dengan berbagai faktor yang bersifat multi dimensional. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat perlu diketahui dan diantisipasi melalui konsultasi masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan guna memastikan agar struktur sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat setempat tidak terabaikan, sehingga pada gilirannya dapat diperoleh respons dan solusi terhadap upaya penguatan kelembagaan usaha dengan melibatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada (Arif dan Wijanarko, 2016). Keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui penguatan usaha tidak lepas dari peran dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, serta insiatif, aspirasi dan peranserta secara aktif dari masyarakat miskin dalam program-program pengentasan kemiskinan (Affandi et al. 2009).

Berbagai faktor memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program penguatan usaha masyarakat miskin. Menurut hasil penelitian Jima (2013) paling tidak ada lima faktor penentu

keberhasilan program pengembangan SDM dan penguatan usaha di perdesaan, yang meliputi aspek: (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Penataan staff, (4) Kepemimpinan, dan (5) Pengawasan. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling menentukan keberhasilan program adalah perencanaan. Dengan perencanaan yang kuat dan matang serta bersifat rasional, lentur dan kontinyu, serta dengan melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek dalam kegiatan, maka program penguatan usaha masyarakat miskin akan terlaksana dengan baik.

ADOPSI TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM USAHA PERTANIAN

Sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu, kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, dan sebagian besar pendapatan masyarakat miskin di perdesaan tersebut masih tergantung dari usaha pertanian. Sementara itu, tantangan terhadap produksi pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan di masa depan bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan mendesak. Pertumbuhan yang pesat di wilayah perkotaan dan sektor industri telah berdampak pada percepatan konversi lahan pertanian subur kepada penggunaan lahan di luar sektor pertanian. Petani dan tenaga kerja perdesaan yang berpendidikan, terampil dan berusia muda banyak yang bermigrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan. Perubahan iklim global berdampak pada peningkatan kerentanan dan ketidakpastian dalam produksi pertanian. Di samping itu, pertumbuhan produktivitas pertanian pada umumnya, khususnya produktivitas tanaman pangan, kurang didukung oleh investasi di bidang pertanian, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan yang memadai. Oleh karena itu, ESCAP (2015) menyarankan akan perlunya untuk mengupayakan perpaduan antara pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyempurnaan kebijakan pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di perdesaan. Adapun inovasi di sini diartikan sebagai adopsi teknologi atau proses sosial baru yang dapat meningkatkan efektivitas usaha dan pelayanan publik (OECD, 2012).

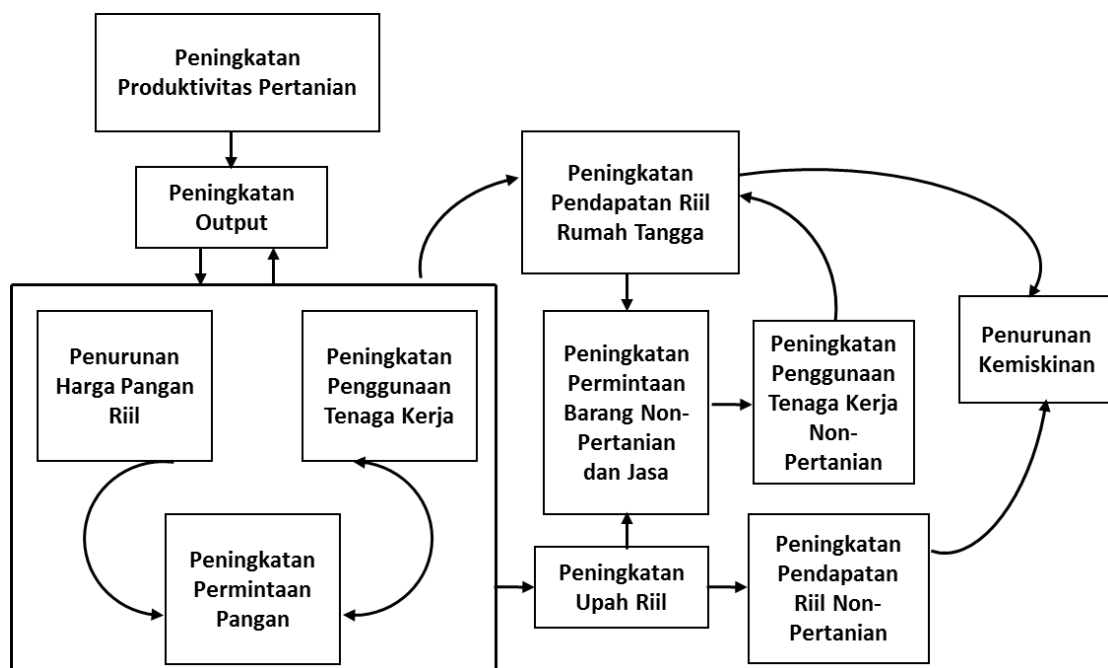
Dhrifi (2014) menyatakan bahwa ada keterkaitan erat antara produktivitas pertanian, inovasi teknologi, dan kemiskinan. Pertumbuhan di sektor pertanian berpengaruh secara

langsung terhadap penurunan kemiskinan, dan berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi berpengaruh nyata terhadap penurunan kemiskinan, melalui peningkatan produktivitas pertanian. Dari hasil penelitian ini disarankan agar Pemerintah meningkatkan investasi di sektor pertanian, terutama investasi pada penelitian dan pengembangan agar menghasilkan teknologi baru dan inovasi pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh para petani dan pada gilirannya dapat menurunkan kemiskinan di perdesaan. Alur pikir hubungan langsung dan tidak langsung antara peningkatan produktivitas pertanian terhadap penurunan angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1. (Schneider and Gugerty, 2011).

Investasi publik dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian perlu ditingkatkan dan difokuskan kembali untuk mendukung intensifikasi pertanian yang berkelanjutan dan untuk memperkecil kesenjangan produktivitas tenaga kerja petani kecil dan menengah. Peran pemerintah yang dominan dalam penelitian dan pengembangan pertanian akan menghasilkan teknologi dan informasi baru sebagai barang publik yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi pertanian, penurunan harga pangan, serta pengurangan kemiskinan. Penelitian dan pengembangan pertanian hendaknya juga memperhatikan

proses alih teknologi dan memberikan apresiasi pada kearifan lokal. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan kelembagaan petani dapat membantu memastikan bahwa layanan penelitian dan pengembangan, serta alih teknologi dapat dilakukan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Selain itu, petani juga memerlukan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, termasuk tata pemerintahan yang baik, kondisi makroekonomi yang stabil, hukum dan peraturan yang adil dan transparan, hak kepemilikan lahan yang terjamin, serta alat pengelolaan risiko dan infrastruktur pasar yang memadai. Peningkatan akses pasar dan permodalan, termasuk akses terhadap pembelian hasil produksi petani oleh Pemerintah dapat memberikan insentif yang kuat untuk adopsi teknologi baru dan inovasi pertanian (FAO, 2014).

Kebijakan intervensi pembangunan pertanian melalui inovasi pertanian perlu memperhatikan keragaman mata pencaharian dan skala usaha tani masyarakat di perdesaan. Keanekaragaman ini sangat penting kaitannya dengan fleksibilitas, stabilitas dan keberlanjutan usaha di perdesaan. Oleh karena itu, intervensi pembangunan pertanian yang menggunakan pendekatan sistem inovasi memiliki dampak positif yang kuat pada beberapa aspek pembangunan, tetapi tidak meliputi semua aspek pembangunan perdesaan. Sebagai contoh, inovasi teknologi produksi komoditas



Sumber: Schneider and Gugerty (2011).

Gambar 1. Alur pikir penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan produktivitas pertanian.

tanaman pangan seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar mempunyai dampak positif terhadap produktivitasnya (yang diukur dalam kg/ha) dan pendapatan petani, tetapi mempunyai dampak yang lemah dari aspek diversifikasi produksi dan pendapatan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dampak positif inovasi pertanian terhadap pembangunan di perdesaan, sistem penelitian dan pengembangan pertanian perlu melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam proses alih teknologi, serta melibatkan para pemangku kepentingan dari kalangan swasta dan masyarakat dalam pengembangan sistem inovasi pertanian (Adebayo and Olagunju, 2015).

Kebijakan intervensi pemerintah melalui introduksi inovasi dan pemanfaatan teknologi pertanian ramah lingkungan (*green agriculture*), dalam implementasinya paling tidak memerlukan dua kebijakan pendukung yaitu: (1) Kebijakan antisipatif terhadap masalah keterbatasan ekonomi pasar lokal yang diperlukan untuk mendukung petani dalam memanfaatkan teknologi baru, seperti keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan dan keterbatasan peluang usaha, dan (2) Kebijakan yang dapat memberikan kesempatan bagi petani untuk memilih jenis teknologi dan atau inovasi yang sesuai dengan aspirasi dan keterbatasan sumber daya yang mereka kuasai, seperti penguasaan lahan yang sempit. Oleh karena itu, introduksi teknologi dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan, Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi petani setempat, sebagai berikut: (1) Ketersediaan kredit usaha, (2) Kondisi kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian, (3) Kondisi pasar tenaga kerja, (4) Kondisi kelembagaan petani, dan (5) Norma dan sosial-budaya setempat (Lovo et al. 2015).

Menurut Nainggolan dkk. (2014) peningkatan produksi pertanian di Indonesia dilakukan melalui perluasan areal tanaman (ekstensifikasi), rehabilitasi, dan peningkatan produktivitas (intensifikasi). Ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan skala usaha petani melalui pembukaan lahan baru, terutama di lahan-lahan terlantar. Rehabilitasi dilakukan melalui perbaikan sarana irigasi yang rusak. Intensifikasi dilakukan utamanya melalui perbaikan genetis tanaman, pemanfaatan teknologi budi daya ramah lingkungan, serta adopsi teknologi panen dan pasca panen.

Ibnu dan Hutabarat (2012) menyatakan bahwa pengenalan teknologi baru kepada petani bukanlah suatu proses yang mudah. Pengenalan teknologi baru kepada petani sering

mengalami kegagalan karena kurang memperhatikan beberapa faktor penting dalam proses adopsi teknologi oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah persepsi kegunaan teknologi, persepsi kemudahan penggunaan teknologi, dan pengalaman masa lalu petani secara positif memengaruhi perilaku petani terhadap adopsi teknologi baru. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peubah sikap persepsi yang mengendalikan perilaku, persepsi kegunaan teknologi, kondisi fasilitas pendukung, dan persepsi terhadap risiko secara positif memengaruhi niat petani dalam mengadopsi teknologi baru.

PENUTUP

Selama dua dekade ini, kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan yang nyata. Walaupun kemiskinan di perdesaan juga telah mengalami penurunan yang nyata, tetapi data menunjukkan bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi di perdesaan. Relatif tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan, mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin lebih rendah dan lebih timpang dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan.

Mengingat bahwa sebagian besar penduduk miskin di perdesaan berpendidikan rendah, dan menguasai lahan yang sempit, maka pengembangan SDM dan penguatan kelembagaan usaha petani merupakan upaya strategis jangka menengah dan jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan. Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan bagi SDM untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Penguatan usaha petani dapat meningkatkan efisiensi usaha yang pada gilirannya memberikan tambahan pendapatan bagi petani miskin.

Sebagian besar pendapatan masyarakat miskin di perdesaan masih tergantung dari usaha pertanian. Sementara itu, tantangan terhadap produksi pertanian berkelanjutan di masa depan bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan mendesak. Oleh karena itu, disarankan tentang perlunya perpaduan antara pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyempurnaan kebijakan pertanian, serta penguatan kelembagaan pertanian guna

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di perdesaan.

Penelitian dan pengembangan pertanian hendaknya terfokus pada peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor sosial-ekonomi dan kelembagaan perdesaan. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan kelembagaan petani mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa layanan penelitian dan pengembangan, serta alih teknologi dapat dilakukan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Selain itu, petani memerlukan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, termasuk tata pemerintahan yang baik, kondisi makroekonomi yang stabil, hukum dan peraturan yang adil dan transparan, hak kepemilikan lahan yang terjamin, serta pengelolaan risiko dan dukungan infrastruktur pertanian dan perdesaan yang memadai. Peningkatan akses pasar dan permodalan, termasuk akses terhadap pembelian hasil produksi petani oleh Pemerintah dapat memberikan insentif bagi proses adopsi teknologi baru dan inovasi pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan bahan, melakukan analisis, sampai ke penulisan naskah tulisan ini. Demikian pula, terima kasih disampaikan kepada pengelola jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, baik Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Redaksi Pelaksana yang telah mengkritisi, memperkaya serta membantu memperbaiki sehingga sampai dengan penerbitannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo O, Olagunju K. 2015. Impact of agricultural innovation on improved livelihood and productivity outcomes among smallholder farmers in Rural Nigeria. Working Paper No. 2015/07. A paper prepared for presentation at the 5th MSM 5th Annual Research Conference Managing African Agriculture: Markets, Linkages and Rural Economic Development 4 September 2015, MSM, Maastricht, The Netherlands. Netherlands (NL): *German Development institute and the Austrian Foundation for Development Research*.
- Affandi S, Wahab SA. 2009. Pembangunan daerah dan penanggulangan kemiskinan (studi kasus implementasi Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Kecil (P4K) di Kabupaten Jombang). *Wacana* 10(1):37-53.
- Aji P. 2015. Summary of Indonesia's poverty analysis. ADB Papers on Indonesia No. 04, Oktober 2015. Jakarta (ID): Asian Development Bank.
- Arif S, Widjanarko H. 2016. Multidimensional poverty of farmers: results of participatory poverty assessment in Gampong Cahya, Kabupaten In Ahrens, B (Editor). *Smeru Research Report*. Jakarta (ID): Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU).
- Dhrifi A. 2014. Agricultural productivity and poverty alleviation: what role for technological innovation. *J Econ Soc Stud*. 4(1):139-158.
- Direktur Jenderal PPMD. 2015. "Kerja mengabdikan desa", kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa. Bahan pada Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah. Jakarta, 30 Juli 2015. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta (ID): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Ernada SEZ, Gaol HL. 2015. Poverty alleviation programmes lessons from Indonesia. Paper Presented to the 6th Meeting of COMCEC Poverty Alleviation Working Group Ankara, Turkey 10-11 September 2015. Jakarta (ID): Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (unpublished).
- [ESCAP] Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2015. Reducing poverty through sustainable agriculture. Paper presented in the Economic and Social Council of The United Nation General Assembly. Third session. Bangkok, 1-3 December 2015. Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Inclusive Development. Bangkok (TH): Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2014. Innovation in family farming. The State of Food and Agriculture 2014 IN BRIEF. Rome (IT): Food and Agriculture Organization.
- Firdaus N. 2014. Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *J Ekon Pembang*. 22(1):55-67.
- Ibnu M, Hutabarat B. 2012. Predicting technology adoption in paddy (rice) cultivation at Sukoharjo and Wonokarto Village of Sekampung Subdistrict in East District of Lampung Province, Indonesia. *J Agro Ekon*. 30(1):59-79.
- [IFAD] International Fund for Agricultural Development. 2016. Rural Development Report 2016. Rome (IT): International Fund for Agricultural Development.
- [IFAD] International Fund for Agricultural Development. 2016. Fostering Inclusive Rural Transformation. Printed by Quintily, Rome, Italy,

- September 2016. Rome (IT): International Fund for Agricultural Development.
- Ikhsan M. 2010. Kebijakan ekonomi makro khususnya stabilisasi harga dan penanggulangan kemiskinan. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 27 November 2010. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Iryanti R. 2014. Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia: permasalahan dan tantangan. Deputi kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM. Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas (tidak dipublikasikan).
- Jima. 2013. Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karkitan Bayat Klaten. *Benefit. J Manaj Bisnis*. 17(2):152-161.
- Lovo S, Bezabih M, Singer G. 2015. Green agricultural policies and poverty reduction. Grantham Research Institute Climate Change and the Environment and Global Green Institute. Seoul (KR): Global Green Growth Institute
- Nainggolan K, Harahap IM, Erdiman. 2014. Teknologi melipatgandakan produksi padi nasional. Jakarta (ID): Kompas Gramedia.
- [OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2012. Innovation for development: A discussion of The issues and an overview of work of the OECD Directorate For Science, Technology And Industry. May 2012. Paris (FR): Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Perdana AA. 2014. Masa depan program kesejahteraan sosial di Indonesia: dari subsidi bahan bakar fosil hingga perlindungan sosial yang lebih baik. Jakarta (ID): The International Institute for Sustainable Development.
- Prawoto N. 2009. Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *J Ekon Stud Pembang*. 9(1):56 - 68.
- Saptana, Wahyuning KS, Rusastra IW. 2014. Kemandirian pangan berbasis pengembangan masyarakat: pelajaran dari Program Pidra, SPFS, Dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. *Anal Kebijak Pertan*. 12(2):119-141.
- Schneider K, Gugerty MK. 2011. Agricultural productivity and poverty reduction: linkages and pathways. *The Evans School Review* 1(1):56-74.
- Setiyanto A. 2015. Kemiskinan rumah tangga pedesaan lahan kering perkebunan. Dalam: Irawan B, Ariningsih E, Pasandaran E. (eds.). Panel Petani Nasional, Rekonstruksi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Jakarta (ID): IAARD Press.
- Sumarno. 2011. Peran pendidikan nonformal dan informal dalam pendidikan karakter bangsa. *Cakrawala Pendidikan*, Mei 2011, Th. XXX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutoyo. 2012. Alternatif pendidikan dalam program pengembangan masyarakat. Makalah pada Seminar Teaching Vulnerable Youth in Unconventional Settings, Jakarta 14 Maret 2012 di Jakarta. Jakarta (ID): World Education (tidak dipublikasikan).
- Ustama DD. 2009. Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue, J Ilmu Adm Kebijakan Pub*. 6(1):1-12.
- Wolff J, Lamb E, Zur-Szpiro E. 2015. A philosophical review of poverty. Joseph Rowntree Foundation Report. June 2015. [Internet]. [cited 2017 Feb 20]. Available from: <https://www.jrf.org.uk/report/philosophical-review-poverty>